

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia. Hal ini setara dengan kedudukan Indonesia sebagai negara termiskin ketiga di dunia. Pertambahan penduduk di dunia tidak hanya berasal dari kelahiran atau pertumbuhan penduduk alami, namun juga akibat pertumbuhan urbanisasi yang menyebabkan munculnya daerah pemukiman miskin dan padat. Setiap pusat pemukiman padat penduduk memiliki masalah degradasi fungsi lingkungan dengan skala yang berbeda. Hal ini juga terjadi pada perkotaan besar di Indonesia. Tingginya populasi penduduk mengubah pola pemanfaatan lahan, perkembangan industri yang tidak seimbang, ketidaksesuaian kepadatan transportasi, kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok, penurunan sumberdaya air serta flora dan fauna dan infrastruktur lingkungan yang buruk selanjutnya menjadi faktor utama penurunan kualitas lingkungan perkotaan (Endina dan Aniati, 2010). *Goal* (MDG) pada tahun 2020, sekitar 1,4 miliar manusia di dunia berada dalam kebijakan

Menurut perkiraan *Millenium Development* MDG di Indonesia hingga tahun 2015 adalah untuk mengurangi jumlah kemiskinan kondisi miskin, semuanya tersebar di negara-negara berkembang. Target penduduk. Pada tahun 2007 BPS melakukan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terhadap sampel rumah tangga untuk mengukur jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan. Hasilnya menunjukkan 37,2 juta penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Akan tetapi, pada tahun 2009 mengalami penurunan BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15% dari total populasi penduduk Indonesia (Endina dan Aniati, 2010).

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang secara umum akan berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurang

tersedianya sarana dan prasarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah perkotaan menjadi kawasan kumuh. Menurut *CSU's Urban Studies Department*, kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sanitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang ada seringkali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor. Beberapa karakter kawasan kumuh Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, kotor, tercemar, lembab dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di wilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat dari keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang terbentuk pada tanggal 20 Desember 2000 hal ini berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2000, Provinsi Gorontalo saat ini memiliki 5 kabupaten dan 1 kota. Kota Gorontalo merupakan ibukota dari Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo mempunyai luas 79,03 Km<sup>2</sup> atau 0,65 persen dari luas Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dibagi menjadi 9 kecamatan dan terdiri dari 50 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terbesar adalah Kecamatan Kota Barat (BPS Kota Gorontalo, 2014).

Secara astronomis, Kota Gorontalo terletak 00° 28' 17" – 00° 35' 56" Lintang Utara dan antara 122° 59' 44" – 123° 05' 59" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Gorontalo memiliki batas bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, bagian Selatan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, bagian Barat berbatasan dengan Sungai Bolango

Kabupaten Gorontalo dan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango (BPS Kota Gorontalo, 2013).

Kota Gorontalo merupakan daerah yang kepadatan penduduknya paling padat diantara wilayah administrasi lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Namun, Kota Gorontalo memiliki jumlah penduduk miskin yang paling sedikit di Provinsi Gorontalo. Penduduk miskin di Kota Gorontalo dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami kenaikan rata-rata penduduk miskin sebesar 5,58%. Namun, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5,61% (BPS Kota Gorontalo, 2013).

Wilayah perkotaan biasanya menjadi pusat kegiatan dari berbagai sektor penting antara lain sektor industri, kesehatan, pendidikan, pemerintahan serta pusat vital lainnya. Sehingga mengakibatkan banyaknya orang ingin tinggal di wilayah perkotaan dan pada akhirnya pertumbuhan jumlah penduduk akibat dari migrasi yang terjadi tidak dapat dihindarkan. Hal ini selain menjadi beban pemerintah dalam hal penyeimbangan jumlah penduduk terhadap lapangan pekerjaan dan daya tampung wilayah terhadap pembangunan yang tidak dapat terkontrol juga menjadi beban yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah Kota Gorontalo sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan kemajuan pembangunan yang ada di Kota Gorontalo.

Jika hal ini semakin dibiarkan, maka bukan tidak mungkin di wilayah Kota Gorontalo akan banyak didapati penduduk miskin yang tersebar di segala tempat. Tidak meratanya permukiman penduduk miskin akan mengakibatkan terdapatnya kawasan perumahan kumuh di wilayah perkotaan dan berimbas pada ketidakberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan penduduknya karena pemerintah mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai tempat atau lokasi dimana penduduk miskin itu berada.

Pola persebaran penduduk miskin dapat menjadi alat yang penting untuk penanggulangan kemiskinan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Gorontalo. Untuk itu perlu dilakukannya suatu penelitian mengenai

pola persebaran penduduk miskin di Kota Gorontalo. Sehingga dapat diketahui informasi mengenai pola dan sebaran penduduk miskin yang ada di Kota Gorontalo.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak meratanya persebaran penduduk miskin yang ada disuatu wilayah perkotaan membuat semakin banyaknya kawasan kumuh di daerah perkotaan.
2. Tidak adanya informasi mengenai pola persebaran penduduk miskin di Kota Gorontalo membuat tidak meratanya pemukiman miskin yang berdampak pada timbulnya kawasan kumuh di daerah perkotaan.
3. Tidak adanya informasi mengenai lokasi terdapatnya penduduk miskin di Kota Gorontalo membuat pemerintah kesusahan dalam pengambilan kebijakan.

## 1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data utama dalam penelitian ini yaitu data mengenai penduduk miskin di Kota Gorontalo.
2. Wilayah penelitian yaitu sebagian Kota Gorontalo (16 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Gorontalo). Penentuan tersebut diambil berdasarkan metode pengambilan sampel yaitu *Multistage Random Sampling* dengan tidak mengkesampingkan 4 kecamatan lainnya yang berada di Kota Gorontalo.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar penduduk miskin di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pola persebaran penduduk miskin di Kota Gorontalo?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar penduduk miskin di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui pola persebaran penduduk miskin di Kota Gorontalo.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Mendapat pengetahuan dalam membuat pola persebaran penduduk miskin di Kota Gorontalo.

2. Bagi Masyarakat

Dapat diperoleh informasi secara spasial mengenai pola dan sebaran penduduk miskin di Kota Gorontalo.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah setempat khususnya pemerintah Kota Gorontalo dalam pengambilan kebijakan.